**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL
KABUPATEN CIANJUR**

**POLICY IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM
IN THE WANGUNJAYA VILLAGE, KECAMATAN NARINGGUL
CIANJUR DISTRICT**

Ijuh Sugandi
Universitas Langlangbuaana Bandung
Ijuhsugandi25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah kurang optimalnya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur diantaranya ditunjukkan dengan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan kepada masyarakat yang termasuk katagori miskin dan sangat layak untuk menerima bantuan. Teori yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III khususnya faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur tahun 2019 ditemukan bahwa : (1) Sosialisasi kebijakan Program Keluarga Harapan kurang sampai pada masyarakat bawah, (2) Masih rendahnya pengetahuan yang dimiliki sebagian pihak sekolah dalam memahami bantuan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin yang memiliki anak yang masih sekolah ditingkat Sekolah Dasar atau Sekolah Mengengah Pertama, karena ada sikap membedakan yang dilakukan sebagian pihak sekolah atas bantuan lainnya yang seharusnya diterima oleh anak dari kalangan miskin, (3) Kurangnya komunikasi antara aparat pelaksana dengan masyarakat. Pada saat pelaksanaan mufakat membahas masalah Program Keluarga Harapan hanya dari lembaga-lembaga nagari yang diundang sementara dari kalanga masyarakat tidak diberi tahu, (4) Kurangnya koordinasi aparat pelaksana dengan unit-unit lain dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu Negara pada hakikatnya merupakan usaha bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan itu untuk mengubah setiap aspek kehidupan Negara dari kondisi yang ada sekarang kearah penghidupan ma

syarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dinegara berkembang adalah masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya dimasyarakat Negara-Negara

yang sedang berkembang salah satunya Negara Indonesia.

Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian dan sebagainya.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan tersendiri kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di beberapa Provinsi yang memiliki jumlah masyarakat yang tergolong miskin, sehingga Pemerintah Pusat hanya memberikan kebijakan untuk penanggulangan masyarakat miskin dan selanjutnya urusannya diberikan kepada pemerintah daerah yang terkait

Pengentasan masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. menurut pendapat sumodiningrat dalam (1998:26) bahwa Kebijakan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup : (1) pengembangan data dasar, (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang membutuhkan perhatian secara serius, karena persoalan kemiskinan telah membawa dampak terhadap kualitas sumberdaya manusia. Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan uji coba penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga

Harapan (PKH) Di beberapa Provinsi. Program serupa di Negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat Tujuan utama Program Keluarga Harapan ini adalah mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Millennium (*MDG's*). *Millenium Development Goal's(MDG'S)* Program Keluarga Harapan adalah sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan kematian bayi. Adapun berbagai indikator dari Program Keluarga Harapan adalah dikhususkan pada bidang pendidikan dan kesehatan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga didukung oleh BPS untuk penyediaan data penerima dan PT. Pos Indonesia untuk sistem manajemen informasi pembayaran serta tenaga ahli (pendamping) Program Keluarga Harapan di masyarakat. Program Keluarga Harapan bukan merupakan kelanjutan atau pengganti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak, tapi untuk memberdayakan kaum ibu dari kalangan miskin agar mampu berusaha dan mendorong anak tetap sehat dan bersekolah. Departemen sosial dalam menjalankan suatu program atau kebijakan yang dilakukan akan mengacu pada sebuah keputusan atau peraturan. Landasan Program keluarga Harapan yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia yang menuju pada mempercepat *MDG's*. Tujuan pembangunan Milenium yaitu meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah tangga sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah tangga sangat Miskin, meningkatkan status kesehatan dan Gizi Ibu hamil, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anaknya.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang menuju pada mempercepat *MDG's*. Tujuan pembangunan Milenium yaitu meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah tangga sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah tangga sangat Miskin, meningkatkan status kesehatan dan Gizi Ibu hamil, serta memberikan makanan bergizi bagi anak-anaknya.

Pemenuhan hak atas kebutuhan dasar sesungguhnya merupakan bagian dari jaminan sosial, yang merupakan komponen hak asasi bagi seluruh warga Negara untuk memperoleh kesejahteraan. Keberadaan jaminan sosial semakin relevan dalam kehidupan kelompok masyarakat miskin karena mereka seringkali dihadapkan pada ketidakpastian yang menghambat fungsi sosialnya. Jaminan sosial juga merupakan bentuk perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi warga yang miskin, terutama dengan kemiskinan kronis. Untuk itu dari sisi kebijakan sosial, Program Keluarga Harapan merupakan cikal bakal pengembangan sistem jaminan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Adapun persyaratan Program Keluarga Harapan yang mengharuskan Rumah Tangga Sangat Miskin untuk menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya, serta memeriksakan ibu hamil, akan membawa perubahan pola pikir dan perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Perubahan pola pikir tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah yang harus

bekerja. Hal ini menuntut perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk terus memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada. Dalam Program Keluarga Harapan, bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan dan gizi. Untuk jangka pendek, bantuan ini akan membantu beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin. Sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Salah satu fokus penelitian yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan adalah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang secara empirik memiliki masalah dalam berbagai bidang diantaranya sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Ekonomi.

Permasalahan bidang ekonomi yang dihadapi warga Desa Wangunjaya yaitu terdapat sebagian warga yang miskin hanya memiliki pendapatan yang rendah serta tingkat pengangguran yang tinggi. Dimana para kepala rumah tangga hanya memiliki pendapatan dibawah Rp 20.000 perharinya yang hanya mengandalkan bekerja sebagai tukang ojek, sebagai penggarap sawah milik orang (buruh tani), kuli panggul (buruh bangunan), hanya berkebun dan sebagai pembantu rumah tangga saja. Adapun masyarakat lainnya yang tergolong pengangguran karena mereka tidak memiliki skill untuk bekerja sehingga pendapatan mereka pun sangat terbatas sekali tiap harinya untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk itu untuk membiayai di bidang lainnya seperti kesehatan dan bidang pendidikan mendapat kesulitan sehingga terjadi masih terdapatnya balita yang

tingkat kesehatannya kurang terjaga, tingkat kesehatan ibu hamil rendah dan warga yang rentan serangan penyakit menahun serta bayi yang terkena cacat fisik karena kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat miskin serta ketidakmampuan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu.

2. Permasalahan Bidang Sosial

Permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat yaitu masih adanya anak-anak usia dini yang putus sekolah dan belum menyelesaikan pendidikan dasar dikarenakan ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Hal ini antara lain disebabkan oleh kemalasan, biaya pendidikan yang tinggi. Serta pendidikan orang tua masyarakat yang tergolong miskin yang rata-rata hanya sampai tamat SD (Sekolah Dasar) dan ada juga yang tidak tamat Sekolah Dasar sehingga hanya mampu menjadi buruh tani sambilan mereka pun terbatas yang menyebabkan pola pikir tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka masih sangat rendah. Bantuan Program Keluarga Harapan merupakan bantuan secara tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada penerimanya. Besarnya dana bantuan yang diperoleh untuk masing-masing Rumah Tangga Sangat Miskin penerima PKH tergantung dari jumlah

1.2 MANFAAT

Tipe Manfaat (*type of Benefit*)

Suatu kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun termasuk Undang-Undang sebagai landasan hukumnya harus memiliki beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari implementasinya. Tipe manfaat dalam sebuah program pemerintah khususnya dalam mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat memiliki beberapa jenis manfaatnya baik bagi masyarakat penerima kebijakan pemerintah itu maupun bagi para *stakeholder* yang melaksanakan kebijakan tersebut, kategori manfaat adanya bantuan

Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pelaksana kebijakan

Mengingat suatu kebijakan publik yang dibuat pemerintah melalui bentuk program ataupun dalam bentuk Undang-Undang senantiasa mengandung manfaat akan target yang akan dicapai. Tidak hanya untuk masyarakat atau para penerima kebijakan pemerintah secara langsung, akan tetapi para *stakeholder* (pelaksana kebijakan) dapat merasakan kemanfaatan yang dicapai. Manfaat dari adanya Program Keluarga Harapan bagi pelaksana sendiri yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa-wangunjaya.

b. Manfaat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan. Selain manfaat bagi para pelaksana, RTSM yang menerima bantuan PKH dapat merasakan manfaat bagi dirinya dan keluarganya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan jalan keluar agar masyarakat miskin tidak terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

1.3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2016: 4)

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif cocok untuk digunakan pada penelitian ini yang menghendaki pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, tulisan, gambar dan tidak menggunakan angka-angka. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami proses dari situasi tertentu dalam masyarakat maupun lembaga secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengetahui proses yang terjadi dalam implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa

Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

a.Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah fase terpenting dalam sebuah penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satori (2012:103), dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif

1. Teknik Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

2. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam, dimana pihak yang diajakan berbicara diminta untuk mengeluarkan pendapatnya dan ide-idenya. Dengan melakukan wawancara, peneliti berarti melakukan penggalian informasi atau data sebanyak-banyaknya dari informan.

3. Teknik Dokumentasi.

Dalam metode penelitian kualitatif, Dokumentasi juga sangat berperan penting. Menurut Satori (2012:146) Dokumentasi adalah sebagai berikut :

“Dokumentasi berasal dari bahasa lain *dorece* yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut *document* yaitu *“something written or printed, to be used as a record or evidence”* atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.

b. Unit Analisa Data

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakekatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa yang hendak dilakukan

terhadap data yang telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan. Teknik analisis data berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dan menentukan penelitian, karena melalui analisis yang optimal dan tepat akan memperoleh hasil penelitian yang bermakna.

d. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Nahid Golfshani (2003:598) dalam bukunya yang berjudul *Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research* mengemukakan bahwa Validitas adalah menentukan apakah hasil dari instrument penelitian sesuai dengan objek penelitian.

e. Operasionalisasi Parameter

Untuk mempermudah sebagai panduan peneliti mencantumkan operasionalisasi

f. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini

1.4 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut :

1). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur pada dimensi komunikasi dengan masyarakat minimnya waktu untuk mensosialisasikan kebijakan menjadi kendala yang menyebabkan terdapatnya informasi yang terhambat sehingga masyarakat kurang mengetahui isi dan kebenaran informasi kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan opini negative tentang isi kebijakan maupun pelaksanaannya.

2) Pad

a dimensi sumberdaya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas

sumberdaya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur.

- 3) Pada dimensi disposisi sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari program PKH. Kesulitan untuk memberikan insentif material yang memadai merupakan fenomena yang dijumpai di lapangan. namun masih banyak yang perlu disempurnakan, khususnya ketersediaan SDM yang memadai sesuai kebutuhan. Dalam dimensi Struktur Birokrasi Untuk pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan aturan kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan Program PKH pada tahun 2019 antara lain: memprioritaskan pembangunan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat , memaksimalkan sumberdaya alam yang tersedia dan menggali potensi masyarakat dengan cara melakukan meningkatkan sarana untuk perkonomian masyarakat

Saran

Hasil penelitian ini disarankan untuk diteliti dari dimensi teori lain, sehingga masalah yang terkait dengan implementasi program keluarga harapan yang merupakan program pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan dapat dikaji secara komprehensif yang menghasilkan konsep dan pemikiran praktis untuk optimalnya program ini dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran yang sistematis bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik. Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambahkan variabel lain serta pendekatan lainnya selain implemetasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

Praktis

- 1.mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui proses dialog yaitu persiapan kerjasama, penentuan arah kebijakan secara bersama-sama masyarakat desa, pembentukan kemitraan, mufakat bersama dalam rangka pemecahan masalah dan lebih aktif memberdayakan masyarakat desa tersebut agar menjadi manusia yang mandiri.

- 2.Bagi Pemerintah Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur agar lebih meningkatkan kemampuan untuk bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), mufakat dan penyuluhan.

- 3.Lebih Pemerintah Kecamatan Naringgul harus berusaha bersikap lebih optimis, responsif dan bersikap lebih loyal antar pegawai serta memberikan penghargaan yang lebih memadai terutama dalam mendukung kegiatan operasional Program Keluarga Harapan (PKH).

Agar Program Keluarga Harapan (PKH) optimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka direkomendasikan untuk melaksanakan koordinasi yang optimal melalui forum-forum koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan publik*. Edisi Ke-2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Aditama.Ridwan.2011. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta..
- Bappenas. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat*

- Kelompok Kerka Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan
- Dewi, Rahayu K. 2016. *Study Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Kebijakan Publik*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: PT. Rafika Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok – Pokok Administasi Publik & Implementasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mubyarto, 1998. *Menanggulangi kemiskinan*. Yogyakarta : Adytia Media
- Naskah Pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH). 2013. Kementerian Sosial RI.
- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sajogyo, 1996. *Garis kemiskinan dan kebutuhan minimum pangan*. Yogyakarta: Adytia Media
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafie, Inu K . 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Thoha, Mitfah. 2011. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Dokumen san Sumber lain :**
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 10 Tentang program Keluarga Harapan